

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini, pemegang saham perseroan memberikan perhatian lebih terhadap persoalan-persoalan kecurangan (*fraud*) mengingat bahwa manajemen senior perusahaan yang sahamnya diperdagangkan kepada publik, tidak diragukan lagi, ingin sekali melaporkan berita positif dan hasil keuangan yang mengesankan (yang akan menyenangkan para investor) dan mengendalikan harga saham ke harga yang lebih tinggi. Selagi kebanyakan perusahaan bertindak etis dan mengikuti ketentuan akuntansi yang telah digaris bawahi ketika melaporkan kinerja keuangannya, beberapa perusahaan lainnya justru mengambil keuntungan dari *gray area* yang ada dalam ketentuan akuntansi untuk menggambarkan hasil keuangannya dalam sebuah cara yang menyesatkan (Hery, 2016:196).

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditur, dan pengguna lainnya. Tanggung jawab untuk memilih dan mengadopsi kebijakan akuntansi yang tepat, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai, serta menyajikan laporan keuangan yang wajar berada di pihak manajemen, bukan auditor (Hery, 2016:132).

Pengendalian menjadi lebih penting bagi organisasi besar. Manajer tidak dapat mengawasi secara pribadi segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya.

Jadi mereka harus mendelegasikan kewenangannya ke bawahan yang berfungsi sebagai wakilnya (Tunggal, 2013:111).

Auditor internal diharapkan ahli dalam aspek pengendalian. Mereka juga diharapkan memiliki pengetahuan mengenai prinsip manajemen, yang mungkin pengendalian merupakan elemen dominan (Tunggal, 2013:128). Kontribusi auditor internal menjadi semakin penting seiring dengan makin berkembangnya dan makin kompleksnya sistem usaha dan pemerintahan. Sayangnya, beberapa manajer tidak menyadari manfaat yang menanti mereka. Kadang kala auditor sendiri tidak memberi pengetahuan kepada manajemen tentang manfaat tersebut (Sawyer *et al.*, 2005:31).

Audit internal merupakan audit yang ditujukan untuk memperbaiki kinerja. Kegiatan audit internal adalah menguji, menilai efektivitas dan kecukupan dalam sistem pengendalian internal yang ada dalam organisasi. Dengan demikian, audit internal adalah berfungsi sebagai penilai independen yang dibentuk dalam suatu organisasi dan mempunyai aktivitas untuk memberikan jaminan keyakinan dan konsultasi (Andayani, 2008:4). Auditor internal harus memahami bahwa tidak ada sistem pengendalian yang akan menghilangkan kemungkinan terjadinya kesalahan (Tunggal, 2013:77). Jika pengendalian internal suatu satuan usaha lemah, maka kemungkinan terjadinya kesalahan, ketidakakuratan ataupun kecurangan dalam perusahaan sangat besar (Agoes, 2012:103).

Ada 3 kondisi kecurangan yang berasal dari pelaporan keuangan yang curang dan penyalahgunaan aktiva diuraikan dalam SAS 99 (AU 316). Ketiga kondisi ini disebut sebagai segitiga kecurangan (*fraud triangle*). Insentif/tekanan, manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan

kecurangan. Kesempatan, situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Dan sikap/rasionalisasi, ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur (Tunggal, 2013:146).

Kasus terbaru terjadi mengenai kecurangan (*fraud*) dialami oleh BUMN milik Indonesia. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2015. Opini WDP diberikan karena BPK masih menemukan beberapa salah saji material dalam LKPP 2015 berupa ketidaksesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut BPK, sekurangnya terdapat enam temuan dalam LKPP 2015 yakni, ketidakkonsisten penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) terkait pencatatan Penyertaan Modal Negara (PMN) PLN, ketidakwajaran harga jual eceran minyak solar bersubsidi yang lebih tinggi dari harga dasar sehingga membebani konsumen sebesar Rp 3,19 triliun, ketidaklengkapan dokumen atas pencatatan piutang bukan pajak sebesar Rp 1,82 triliun, uang pengganti perkara tipikor pada Kejaksaan RI sebesar Rp 33,94 miliar dan ketidaksesuaian piutang Kementerian ESDM dengan hasil konfirmasi wajib usaha sebesar Rp 101,34 miliar, ketidaklengkapan dokumentasi atas nilai persediaan di Kementerian Pertahanan sebesar Rp 2,49 triliun dan ketidaklengkapan dokumentasi atas nilai persediaan untuk diserahkan ke masyarakat di Kementerian Pertanian sebesar Rp 2,33 triliun, ketidakakuratan

pencatatan dan penyajian Saldo Anggaran Lebih (SAL) dibandingkan dengan fisik sebesar Rp 6,6 triliun, ketidaklengkapan dokumentasi atas koreksi-koreksi pemerintah yang mengurangi nilai ekuitas sebesar Rp 96,53 triliun dan transaksi antar entitas sebesar Rp 53,34 triliun (Marta, 2016).

Contoh kasus kecurangan yang baru diungkap adalah KPK menangkap dua pejabat BUMN serta satu orang perantara terkait kasus korupsi di PT. BA, dan sejumlah barang bukti uang dollar sebesar 128.835 Dollar AS atau setara dengan Rp 1,7 miliar. Dalam operasi tangkap tangan itu, KPK menahan tiga orang, yakni SWA sebagai direktur keuangan PT. BA, senior manager PT. BA berinisial DPA dan MRD sebagai perantara. PT. BA adalah salah satu perusahaan BUMN (<http://www.bbc.com>, 2016).

Kegagalan pencegahan *fraud* disebabkan oleh faktor intern dan ekstern organisasi. Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa tindakan utama untuk pencegahan *fraud* adalah menciptakan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang andal pada aktivitas organisasi. Selain masalah moral dan etika, kegagalan pencegahan *fraud* juga disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern. Kegagalan pencegahan *fraud* karena kelemahan pengendalian intern terutama merupakan faktor internal organisasi yaitu lemahnya rancangan struktur pengendalian dan lemahnya pelaksanaannya. Kelemahan rancangan struktur pengendalian karena adanya anggapan bahwa pengendalian intern yang andal atau baik memerlukan biaya yang mahal baik sumber dana maupun sumber daya lain (Karyono, 2013:85).

Audit internal memainkan peran yang penting dalam memantau aktivitas untuk memastikan bahwa program dan pengendalian anti kecurangan telah berjalan

efektif. Aktivitas audit internal dapat menghalangi sekaligus mendeteksi kecurangan. Auditor internal akan membantu menghalangi kecurangan dengan memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang mengurangi risiko kecurangan (Arens *et al.*, 2015:411).

Menurut Jayanti (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Audit Internal dalam Pencegahan Kecurangan* menemukan bahwa Audit Internal di dalam perusahaan dapat mencegah terjadinya praktik kecurangan (*fraud*).

Penelitian yang dilakukan oleh Festi dkk. (2014) yang berjudul *Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan*, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan audit internal terhadap pencegahan kecurangan. Peran audit internal dengan pencegahan kecurangan memiliki hubungan yang kuat. Semakin baik peran audit internal maka semakin tinggi pencegahan kecurangan.

Dina Rizkyana dkk (2015) dengan penelitiannya yang berjudul *Pengaruh Audit Internal dan Audit Eksternal Terhadap Pencegahan Kecurangan (Survey pada BUMN di Kota Bandung)* menyebutkan bahwa hasil penelitian mendapatkan hasil bahwa audit internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada BUMN di Kota Bandung. Dimana semakin baik audit internal akan diikuti pencegahan *fraud* yang semakin baik dan pengendalian yang dilakukan auditor merupakan tolak ukur sebuah perusahaan, baik dalam pencegahan kecurangan maupun pengendalian internal lainnya.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti kembali apakah dengan tempat dan waktu yang berbeda, peran auditor internal memiliki pengaruh yang sama seperti penelitian terdahulu terhadap pencegahan kecurangan. Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis memilih judul penelitian “**PENGARUH FUNGSI AUDIT INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN STUDI KASUS PADA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan/*fraud* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh fungsi audit internal terhadap pencegahan kecurangan/*fraud* di perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi :

1. Akademisi

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai alat bantu belajar mengajar dan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai menambah wawasan dan

pengetahuan agar dapat memahami mengenai pencegahan kecurangan yang terjadi pada perusahaan dengan fungsi audit internal.

2. Perusahaan

Dengan hasil penelitian ini diharapkan memberi pandangan dan acuan pada perusahaan tentang pentingnya fungsi audit internal untuk mencegah kecurangan yang akan terjadi sebelum merugikan perusahaan terkait.

3. Auditor Internal

Diharapkan penelitian ini dapat membantu auditor internal agar lebih waspada dan lebih teliti pada pencegahan kecurangan di perusahaan.

